

ABSTRAK

Mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan sangat heterogen dalam berbagai dimensi, aspek, dan lapisan masyarakat. Maka sistem desentralisasi lebih diperjelas gambarannya melalui asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Maka Pelayanan Publik harus direalisasikan melalui sebuah penyelenggaraan Pelayanan Publik guna untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara kepada pihak Camat yang memimpin Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu ditafsirkan secara logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ditemukan beberapa kendala yang ditemui.

Pemerintah Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan Pelayanan Publik, maka dalam rangka penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banyumanik perlu mengambil langkah-langkah strategis dengan rencana tindak lanjut berupa Pengembangan Budaya Kerja.

Kata Kunci : *Pelayanan Publik, Peran Camat, Kecamatan Banyumanik*